

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Ukuran Pemerintah Daerah

2.1.1.1 Pengertian Ukuran Pemerintah Daerah

Ukuran merupakan suatu gambaran mengenai besar atau kecilnya suatu objek. Menurut Suhardjanto dalam Nugroho dan Prasetyo (2018) ukuran pemerintah daerah menggambarkan besaran suatu organisasi pemerintahan. Ukuran pemerintah daerah merupakan besar kecilnya ukuran pemerintahan suatu daerah yang dapat diukur dengan indikator kuantitatif seperti total aset, jumlah pegawai, total pendapatan, dan tingkat produktifitas (Damanpour dalam I. P. Sari et al., 2016).

Salah satu cara untuk mengetahui ukuran pemerintah daerah yaitu dengan melihat total aset yang dimilikinya. Sari dan Mustanda (2019) menyatakan bahwa “ukuran perintah daerah dapat diproksikan dengan total aset yang dimiliki daerah tersebut”. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah PSAP No. 01 menjelaskan:

“Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah daerah, sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan yang

diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.”

Jadi, dapat disimpulkan ukuran pemerintah daerah merupakan skala daerah yang menggambarkan karakteristik pemerintah daerah yang dapat dinilai melalui total aset yang dimiliki, jumlah pegawai, total pendapatan yang diperoleh, serta tingkat produktivitas.

Aset menggambarkan sumber daya yang dapat digunakan dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Pemerintah daerah harus didukung oleh sumber daya yang memadai agar dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Semakin besar total aset yang dimiliki, semakin besar pula ukuran pemerintah daerahnya. Pemerintah daerah yang mempunyai ukuran yang lebih besar akan relatif lebih mudah tersebut untuk melaksanakan programnya karena memiliki sumber daya yang cukup untuk mendukung kinerja pemerintah dalam memenuhi pelayanan masyarakat (Kusumawardani 2012).

2.1.1.2 Pengukuran Ukuran Pemerintah Daerah

Menurut Damanpour dalam Sari I.P (2016), besar kecilnya daerah dapat diukur melalui beberapa indikator yakni:

1. Total aset daerah
2. Jumlah pegawai
3. Jumlah penduduk
4. Tingkat produktivitas

Dalam penelitian ini, total aset dipilih sebagai indikator ukuran pemerintah daerah karena mencerminkan menggambarkan sumber daya ekonomi yang dimiliki daerah.

2.1.2 Pendapatan Asli Daerah

2.1.2.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan yang diperoleh daerah berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Halim dan Iqbal (2019:192), Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan yang menjadi hak pemerintah daerah dan dipungut melalui mekanisme yang diatur dalam peraturan daerah, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pendapatan asli daerah merupakan salah satu unsur utama yang menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber dayanya melalui peran aktif masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi serta upaya pemerintah lainnya dalam meningkatkan penerimaan yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut (Darmadi 2021). Adanya pendapatan asli daerah bertujuan untuk memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk menggali potensi daerah yang dimiliki dalam rangka mendanai pelaksanaan otonomi daerah sebagai wujud pelaksanaan asas desentralisasi.

Jadi dapat disimpulkan Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil pengelolaan potensi asli daerah yakni, pajak daerah,

retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan yang sah, yang digunakan untuk mendukung dalam mendanai penyelenggaraan pemerintah daerah.

2.1.2.2 Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah

Sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 pasal 285 ayat (1) bahwa sumber pendapatan asli daerah meliputi hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

1. Pajak Daerah

Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menjelaskan:

“Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Adapun jenis-jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah antara lain:

- a. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
- b. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- c. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT).
- d. Pajak Reklame.
- e. Pajak Air Tanah.
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan (MBLB).
- g. Pajak Sarang Burung Walet.
- h. Opsen Bea Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

- i. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

2. Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan yang dilakukan pemerintah daerah terhadap orang pribadi atau badan atas pemberian jasa layanan atau izin tertentu. Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 Retribusi daerah dapat digolongkan dalam tiga kelompok yaitu:

a. Retribusi Jasa Umum

Retribusi jasa umum adalah pungutan yang dikenakan atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum. Jenis pelayanan yang dikenakan retribusi oleh pemerintah yang tergolong retribusi jasa umum yakni atas pelayanan kesehatan, pelayanan persampahan/kebersihan, pelayanan parkir ditepi jalan umum, pelayanan pasar, dan lain-lain.

b. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi jasa usaha adalah pungutan yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah yang menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Jenis pelayanan yang tergolong dalam retribusi jasa usaha yakni atas penyediaan tempat kegiatan usaha, penyediaan tempat pelelangan, penyediaan tempat khusus parkir, pelayanan jasa kepelabuhan, pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga, dan lain-lain.

c. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi perizinan umum adalah pungutan yang dikenakan atas pelayanan terkait pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah penerimaan daerah yang berasal dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, sumber penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berasal dari bagian laba perusahaan milik daerah dan hasil kerja sama dengan pihak ketiga.

4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah adalah penerimaan daerah yang berasal dari luar pajak dan retribusi daerah atau lain-lain pengelolaan kekayaan milik pemerintah daerah.

2.1.3 Belanja Modal

2.1.3.1 Pengertian Belanja Modal

Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, belanja adalah semua pengeluaran oleh bendahara umum negara/bendahara umum pemerintah provinsi/kabupaten kota yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali

oleh pemerintah. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Menurut Ariadi (2021: 36) belanja modal adalah anggaran yang dialokasikan untuk memperoleh aset tetap bagi pemerintah daerah yang dapat digunakan sebagai sarana pembangunan daerah.

Menurut Ambya (2023: 54) belanja modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, misalnya tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

Dari pengertian-pengetian diatas dapat disimpulkan belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka memperoleh aset tetap atau lainnya yang manfaatnya lebih dari satu tahun anggaran yang digunakan untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan daerah.

2.1.3.2 Klasifikasi Belanja Modal

Menurut Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Modal diklasifikasi menjadi 6 macam yakni:

1. Belanja Tanah

Belanja tanah adalah seluruh pengeluaran yang dilakukan pemerintah daerah terkait perolehan tanah.

2. Belanja Peralatan dan Mesin

Belanja peralatan dan mesin adalah seluruh pengeluaran yang dilakukan pemerintah terkait peralatan dan mesin yang memiliki masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan.

3. Belanja Bagunan dan Gedung

Belanja bangunan dan gedung adalah seluruh pengeluaran yang dilakukan pemerintah terkait pembangunan, akuisisi, penggantian bangunan atau gedung.

4. Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Belanja jalan, irigasi, dan jaringan adalah seluruh pengeluaran yang dilakukan pemerintah daerah terkait pengadaan, penggantian, pemeliharaan jalan, irigasi, jaringan.

5. Belanja Aset Tetap Lainnya

Belanja aset tetap lainnya yaitu seluruh pengeluaran yang dilakukan pemerintah daerah terkait aset tetap yang tidak tercantum dalam nomor 1 sampai 4 yang digunakan untuk menunjang kegiatan operasional pemerintah daerah.

6. Belanja Aset Lainnya

Belanja aset lainnya yaitu seluruh pengeluaran yang dilakukan pemerintah daerah terkait aset yang tidak digunakan untuk menunjang kegiatan operasional pemerintah, yang tidak dapat memenuhi kriteria aset tetap, namun harus disajikan di pos aset lainnya sesuai nilai yang tercatatnya.

2.1.4 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

2.1.4.1 Pengertian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa kinerja adalah keluaran atau hasil dari suatu kegiatan yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

Menurut Mustamin (2019:111) kinerja adalah gambaran tentang seberapa baik suatu kegiatan, program, atau kebijakan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan yang sudah direncanakan oleh sebuah organisasi dalam rencana kerjanya. Mulyani dan Wibowo (2017) menyatakan bahwa kinerja keuangan merupakan cara untuk menilai pencapaian suatu entitas melalui indikator keuangan.

Menurut Natoen *et al.* (2019), kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dipahami sebagai bentuk pencapaian dalam mengelola sector keuangan daerah selama satu tahun anggaran. Cakupan pengelolaan ini meliputi bagaimana daerah memperoleh pendapatan serta mengatur pengeluaran atau belanjanya. Untuk menilai pencapaian tersebut, digunakan sebagai indikator keuangan yang telah ditentukan berdasarkan aturan atau kebijakan yang berlaku. Penilaian ini penting untuk mengetahui sejauh mana efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan oleh pemerintah daerah dalam periode tertentu.

Dari pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan tingkat pencapaian atas kegiatan/program yang dilaksanakan selama periode tertentu dalam rangka mewujudkan visi, misi, sasaran dan tujuan pemerintah daerah, yang diukur melalui indikator keuangan

pemerintah yang telah ditetapkan, yang didalamnya terdapat penerimaan dan pengeluaran daerah.

Halim dan Kusufi (2021) menggambarkan sistem pengukuran sektor publik sebagai suatu sistem yang dirancang untuk membantu para manajer publik dalam mengevaluasi pencapaian dengan menggunakan alat ukur finansial dan nonfinansial. Pada lingkup penelitian ini, yakni kinerja keuangan pemerintah daerah mengacu pada sejauh mana kemampuan pemerintah daerah dapat mengelola keuangannya, khususnya dalam memperoleh pendapatan dan mengelola pengeluaran dalam suatu periode anggaran tertentu.

2.1.4.2 Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Murti et al. (2021) menyatakan pengukuran kinerja menyatakan bahwa pengukuran kinerja menunjukkan hasil dari implementasi dari sebuah kegiatan/kebijakan. Menurut Mardiasmo (2018), tujuan dilakukan pengukuran sektor publik yaitu:

1. Untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah.
2. Untuk membantu pemerintah agar fokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja.
3. Untuk membantu pemerintah dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pemberian pelayanan publik.

Menurut Santoso *et al.* (2021), terdapat tiga tujuan utama penilaian kinerja keuangan daerah, yaitu:

1. Sebagai mekanisme untuk meningkatkan kinerja organisasi publik.

2. Untuk mendukung alokasi sumber daya keuangan yang efisien, dan tepat sasaran sehingga belanja pemerintah selaras dengan prioritas pembangunan.
3. Memperkuat akuntabilitas dan transparansi publik, dengan menunjukkan bagaimana dana publik dikelola dan digunakan.

Pengukuran kinerja keuangan merupakan suatu proses sistematis yang bertujuan untuk menilai kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya keuangan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Dalam mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dilakukan dengan analisis rasio keuangan. Berikut beberapa rasio yang digunakan dalam menilai kinerja keuangan pemerintah daerah yaitu:

a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian daerah merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan daerah dalam membiayai aktivitasnya sendiri dengan pendapatan asli daerahnya. Rasio kemandirian keuangan daerah dihitung dengan:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pendapatan Transfer} + \text{Pinjaman}} \times 100\%$$

Tabel 2.1
Kategori Rasio Kemandirian

Kategori Kemandirian	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0-25	Instruktif
Rendah	25-50	Konsultif
Sedang	50-75	Partisipatif
Tinggi	75-100	Delegatif

Sumber: Angin et.al (2023)

b. Rasio Efektifitas Keuangan Daerah

Rasio efektifitas adalah rasio menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan APBD dengan target yang telah ditetapkan.

Rasio efektifitas dihitung dengan:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Target Pendapatan}} \times 100\%$$

c. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara output dan input atau antara realisasi pengeluaran daerah dan penerimaan daerah.

Semakin kecil angka rasio ini, maka semakin efisien, dan juga sebaliknya.

Rasio efisiensi dihitung dengan:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100\%$$

Menurut Mahsun dalam Fathah (2017), penilaian efisiensi ditentukan dengan:

Tabel 2. 2

Kategori Rasio Efisiensi

Nilai	Kategori
>100%	Tidak efisien
100%	Efisien berimbang
< 100%	Efisien

Sumber: Fathah (2017)

d. Rasio Aktivitas (Keserasian Belanja Daerah)

Rasio aktivitas (keserasian belanja daerah) merupakan rasio yang menggambarkan prioritas belanja daerah. Rasio aktivitas terdiri dari:

1. Rasio Belanja Rutin, menggambarkan belanja rutin daerah selama satu periode anggaran, yang dihitung dengan:

$$\text{Rasio Belanja Rutin} = \frac{\text{Total Belanja}}{\text{Total APBD}} \times 100\%$$

2. Rasio Belanja Bangunan, menggambarkan belanja pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah selama satu periode anggaran.

$$\text{Rasio Belanja Pembangunan} = \frac{\text{Total Belanja Pembangunan}}{\text{APBD}} \times 100\%$$

Dari beberapa rasio di atas, penulis menggunakan rasio kemandirian keuangan daerah sebagai indikator kinerja keuangan pemerintah daerah, yang mana mampu menggambarkan kemampuan keuangan daerah secara mandiri tanpa bergantung transfer dari pusat serta pinjaman.

2.1.5 Kajian Empiris

Adapun penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tatas Ridho Nugroho dan Novi Elo Prasetyo (2017) dengan judul Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Jawa Timur. Hasil penelitian ini yaitu secara parsial Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan Daerah, *Integovernmental Revenue* berpengaruh positif terhadap Kinerja

Keuangan Pemerintah Daerah, dan Belanja Daerah berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Ni Putu Gina Sukma Antari dan Ida Bagus Panji Sedana (2018) dengan judul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dan Belanja Modal berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Berti Indah Sari dan Halmawati (2021) dengan judul Pengaruh pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. Hasil penelitian ini yaitu Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, dan Belanja Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Ni Made Diah Permata Sari dan I Ketut Mustanda (2019) dengan judul Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah, dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil penelitian ini yaitu Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, dan Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Eva Ida Malau dan Sirojuzilam Erlina (2019) dengan judul *The Effect of Local Government Revenue (LGR), Balance Fund, Capital Expenditure and Fiscal*

Stress on the Financial Performance of Regional Government in the District/City of Sumatra Utara Province. Hasil penelitian ini yaitu *Local Government Revenue (LGR)* berpengaruh positif terhadap *Financial Performance of Regional Government*, *Balance Fund* berpengaruh positif terhadap *Financial Performance of Regional Governments*, dan *Fiscal Distress* berpengaruh positif terhadap *Financial Performance of Regional*, dan *Capital Expenditure* tidak berpengaruh terhadap *Financial Performance of Regiaonal Government*.

Dwi Saraswati, S.Pd., M.Si. dan Yunita Sari, S.E., M.Si., Ak., CA. (2019) dengan judul *Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Dearah, Leverage*, terhadap *Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*. Hasil penelitian ini adalah *Pendapatan Asli Daerah* berpengaruh terhadap *Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*, *Ukuran Pemerintah Daerah* tidak berpengaruh terhadap *Kinerja Keuangan Pemerintah*, *Leverage* tidak berpengaruh terhadap *Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*.

Rudythia Dwitama dan Sri Rahayu S.E., M.Ak., Ak., CA (2020) dengan judul *Pengaruh Ukuran Pemerintah, Intergovernmental Revenue*, dan *Opini Audit* terhadap *Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2014-2018)*. Hasil penelitian ini yaitu *Ukuran Pemerintah* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*, *Intergovernmental Revenue* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*, *Opini Audit* berpengaruh negatif secara signifikan terhadap *Kinerja Keuangan Pemerintah*

Daerah, secara simultan Ukuran Pemerintah, *Intergovernmental Revenue*, dan Opini Audit berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Armaja, Ridwan Ibrahim, dan Aliamin (2015) dengan judul Pengaruh Kekayaan Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan (Studi pada Kabupaten/Kota di Aceh). Hasil penelitian ini yaitu Kekayaan Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Daerah secara Bersama-sama maupun secara terpisah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan.

Sri Mulyani da Hardiyanto Wibowo (2017) dengan judul Pengaruh Belanja Modal, Ukuran Pemerintah Daerah, *Intergovernmental Revenue*, Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan (Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2012-2015). Hasil penelitian ini adalah Belanja Modal berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, *Intergovernmental Revenue* berpengaruh negatif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Nuwun Priyono dan Siti Arifah, dan Eva Wulandari (2018) dengan judul Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah, Kompleksitas Pemerintahan, dan Kemandirian Keuangan Daerah terhadap Kinerja Fiskal Kabupaten/kota di Jawa Tengah. Hasil penelitian ini adalah Kekayaan Daerah dan Jumlah Penduduk secara parsial berpengaruh terhadap Kinerja Fiskal, sedangkan Ukuran Pemerintah Daerah, Tingkat Ketergantungan, Jumlah SKPD dan Kemandirian Keuangan Daerah secara parsial tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah

Daerah, serta secara simultan Ukuran Pemerintah Daerah, Tingkat Ketergantungan, Jumlah Penduduk, Jumlah SKPD, dan Kemandirian Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Ardiyan Natoen, Ayu Febriyanti, Sarikadarwati, dan Susi Ardiani (2019) dengan judul Pengaruh Karakteristik Pemerintahan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan Tahun 2013-2017). Hasil penelitian ini yaitu Population (Jumlah Penduduk), Size (Ukuran Daerah), Wealth (Tingkat Kemakmuran) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, secara parsial Population berpengaruh negatif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, Ukuran Daerah dan Tingkat Kemakmuran berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, dan *Intergovernmental Revenue* tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Nanda Dipa Prastiwi dan Andri Waskita Aji (2020) dengan judul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dana Keistimewaan, dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun anggaran 2013-2018). Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, Dana Perimbangan berpengaruh signifikan negatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah, Dana Keistimewaan berpengaruh tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, Belanja Modal berpengaruh tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan

Pemerintahan Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Dana Pertimbangan, dan Dana Istimewaan, Dan Belanja Modal secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Carlos Arnold Atmoko dan Khairudin 2022 dengan judul Dampak Pendapatan Daerah dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah sementara itu Belanja Modal tidak berdampak atau berpengaruh pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Hasna Latifah dan Haryanto 2019 dengan judul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2013 sampai 2017. Hasil penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Daerah, Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dan secara bersama-sama Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Dwi Ratnasari dan Dianita Meirini (2022) dengan judul Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, dan Silpa dalam Pengaruhnya Kinerja Keuangan. hasil penelitian ini adalah Kinerja Keuangan tidak dapat dipengaruhi oleh Pendapatan Asli Daerah, Kinerja Keuangan secara negatif signifikan oleh Dana Perimbangan dan Silpa, serta Kinerja Keuangan dapat dipengaruhi oleh Belanja Modal.

Afia Maulina, Mustafa Alkamal, Nabila Salsa Fahira (2021) dengan judul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, dan Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. hasil penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah, sedangkan Belanja Modal dan Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Amanda Yecci Noeng, Yuliana Anggreini Dua Delang Kolit, Elisabhet Yessi Da Rato (2023) dengan judul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kinerja Keuangan Daerah (Studi Kasus pada Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2016-2020). Hasil penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Daerah, Dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Daerah, dan Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh Kinerja Keuangan Daerah.

Indah Puspa Sari (2016) dengan judul Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Leverage, Dana Perimbangan, dan Ukuran Legislatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Kab/Kota Pulau Sumatera). Hasil penelitian ini adalah Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, Leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, Ukuran Legislatif tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Afifah Fauziah Amalia N dan Haryanto (2019) dengan judul Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2017. Hasil penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah, Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah, Belanja Modal tidak berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Lis Djuniar da Ida Zuraida (2018) dengan judul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan. Hasil penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh negatif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah, Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh negatif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah, serta Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh secara simultan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

Tabel 2. 1

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Penulis

No.	Nama, Tahun dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
1.	Tatas Ridho Nugroho dan Novi Eko Prasetyo 2018	• Ukuran Pemerintah Daerah	• <i>Intergovernmental Revenue</i>	Ukuran Daerah secara parsial berpengaruh	Pemerintah Jurnal Akuntansi dan Pendidikan Vol. 7 No. 1

Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa Timur	• Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	• Belanja Daerah • Subjek penelitian	terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, <i>Intergovernmental Revenue</i> berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, Belanja Daerah berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Halaman 27-34 Madiun, April 2018 p-ISSN: 2302-6251 e-ISSN: 2477-4995
2. Ni Putu Gina Sukma Antari dan Ida Bagus Panji Sendana 2018 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	• Pendapatan Asli Daerah • Belanja Modal • Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	• Subjek penelitian	Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, Belanja Modal berpengaruh negatif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	E-Jurnal Manajemen Unud, Vol. 7, No. 2, Halaman 1110 2018- ISSN: 2302-8912
3. Berti Indah Sari dan Halmawati 2021 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatra Barat	• Pendapatan Asli Daerah • Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	• Dana Alokasi Umum • Belanja Daerah • Subjek Penelitian	Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, dan Belanja Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Jurnal Eksplorasi Akuntansi Vol. 3, No. 1 Februari 2021 Halaman 1-11 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang e-ISSN: 2656-3649 (Online)
4. Ni Made Diah Permatasari dan I Ketut Mustanda 2019 Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah, dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	• Ukuran Pemerintah Daerah • Pendapatan Asli Daerah • Belanja Modal	• Kinerja Keuangan Daerah (Rasio Pertumbuhan PAD)	Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, dan Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	E-Jurnal Manajemen, Vol. 8, No. 8, 2019 Halaman 4859-4787 Universitas Udayana ISSN: 2302-8912
5. Eve Ida Malau, Erlina, dan Sirojuzilam 2019 <i>The Effect of Local Government Revenue (LGR),</i>	• <i>Capital Expenditure</i> • <i>Financial Performance of Regiaonal Government</i>	• <i>Local Government Revenue (LGR)</i> • <i>Balance Fund</i> • <i>Fiscal Stress</i>	Local Government Revenue berpengaruh positif terhadap <i>Financial Performance of Regional Government</i> , <i>Balance Fund</i> berpengaruh positif terhadap <i>Financial</i>	<i>International Journal of Publik Budgeting, Accounting and Finance</i> Vol. 2, 2019 Halaman 1-15

	<i>Balance Fund, Capital Expenditure and Fiscal Stress on The Financial Performance of Regional Government in The District/City of Sumatra Utara Province</i>			<i>Performance of Regional Governments, dan Fiscal Distress berpengaruh positif terhadap Financial Performance of Regional, dan Capital Expenditure tidak berpengaruh terhadap Financial Performance of Regional Government</i>	ISSN: 2655-6693
6.	Dwi Saraswati dan Yunita Sari Rioni 2019 Pengaruh Pendapatan asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, <i>Leverage</i> Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	• Ukuran Pemerintah Daerah • Pendapatan Asli Daerah • Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	• <i>Leverage</i>	Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah tidak berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah, <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik Vol. 9 No. 2 Februari 2020 Halaman 110-120 Universitas Pembangunan Panca Bali ISSN: 20874669
7.	Rudyhia Dwitama dan Sri Rahayu 2020 Pengaruh Ukuran Pemerintah, <i>Intergovernmental Revenue</i> dan Opini Audit terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2014-2018)	• Ukuran Pemerintah Daerah • Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	• <i>Intergovernmental Revenue</i> • Opini Audit	Ukuran Pemerintah, <i>Intergovernmental Revenue</i> , dan Opini Audit secara simultan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan Rasio Efektivitas dan Efisiensi. Sedangkan secara Parsial, Ukuran Pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan Rasio Efisiensi, <i>Intergovernmental Revenue</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, sedangkan Opini Audit berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dan berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	<i>E-Procceding of Management</i> Vol. 7, No. 2 Agustus 2020 Halaman 3251 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Telkom ISSN: 2355-9357
8.	Armaja, Ridwan Ibrahim, dan Aliamin 2015	• Kinerja Keuangan	• Kekayaan Daerah	Kekayaan Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Daerah baik	Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam

Pengaruh Kekayaan Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah (Studi pada Kabupaten/Kota di Aceh)	• Dana Perimbangan • Belanja Daerah	secara bersama-sama maupun secara terpisah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan	Universitas Syiah Kuala Vol. 3, No. 2 September 2015 Halaman 168-181 Universitas Syiah Kuala ISSN: 2502-6976	
9. Sri Mulyani dan Hardiyanto Wibowo 2017 Pengaruh Belanja Modal, Ukuran Pemerintah Daerah, <i>Intergovernmental Revenue</i> , dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan (Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2015)	• Belanja Modal • Ukuran Pemerintah Daerah • Pendapatan Asli Daerah • Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	• <i>Intergovernmental Revenue</i> Belanja berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah sedangkan <i>Itergovernmental Revenue</i> , Ukuran Pemerintah Daerah, dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemeritah Daerah	KOMPARTEME N Vol. XV, No. 1 Maret 2017 Halaman 57-66 Universitas Muhammadiyah Purwokerto ISSN: 2579-8928	
10. Nuwun Priyono, Siti Arifah, dan Eva Wulandari 2018 Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah, Kopleksitas Pemerintah Daerah, dan Kemandirian Keuangan Daerah terhadap Kinerja Fiskal Kabupaten/Kota di Jawa Tengah	• Karakteristik Pemerintah Daerah (Ukuran Pemerintah Daerah)	• Kompleksitas Pemerintah Daerah • Karakteristik Pemerintah Daerah • Kemandirian Keuangan Daerah • Kinerja Fiskal	Hanya keyaaan daerah dan Jumlah Penduduk berpengaruh secara parsial terhadap kinerja fiskal, sedangkan secara simultan, Ukuran Pemerintah Daerah, kekayaan Daerah, Tingkat Ketergantungan, Jumlah Penduduk, Jumlah SKPD, dan Kemndirian Keuangan Daerah berpengaruh secara bersama-sama terhadap Kinerja Fiskal.	Jurnal MONEX Vol. 7, No. 2 Juni 2018 Halaman 404-410 Fakultas Ekonomi Universitas Tidar p-ISSN:2089-5321 e-ISSN: 2549-5046
11. Ardiyan Natoen, Ayu Febrianti, Sarikadarwati, dan Susi Ardiani 2019 Pengaruh Karakteristik Pemerintahan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan (Studi Empiris pada	• Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	• Karakteristik Pemerintahan	Jumlah Penduduk, Ukuran Pemerintah Daerah dan Kekayaan Daerah berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Jurnal Riset Terapan Akuntansi Vol. 3, No. 2 2019 Halaman 106-117 p-ISSN: 2579-969X e-ISSN: 26227940

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di Sumatra Selatan Tahun 2013-2017)					
12.	Nanda Dipa Prastiwi dan Waskita Aji 2020	• Pendapatan Asli Daerah • Belanja Modal • Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	• Dana Perimbangan • Dana Keistimewaan	Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah, Dana Keistimewaan berpengaruh tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, Belanja Modal berpengaruh tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Dana Pertimbangan, dan Dana Istimewaan, Dan Belanja Modal secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.	Jurnal Kajian Bisnis Vol. 28, No. 1, 2020 Halaman 89-105 STIE Widya Wihaha p-ISSN: 0854-4530 e-ISSN:2622-173X
13.	Carlos Arnold Atmoko dan Khairudin 2022	• Belanja Modal • Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	• Pendapatan Daerah	Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah sementara itu Belanja Modal tidak berdampak atau berpengaruh pada Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah.	Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan, Vol. 10, No. 2, 2022 Halaman 291-296 IBI Kesatuan ISSN: 2337-7852 E-ISSN: 2721-3048
14.	Resa Novita dan Fefri Indra Arza 2024	• Pendapatan Asli Daerah • Belanja Modal • Kinerja Keuangan Pemerintah	• Dana Perimbangan	Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikansi positif terhadap Kinerja Pmerintah Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA) Vol. 6 No. 1 Februari 2024 Hal. 430-443 Universitas Negeri Padang e-ISSN: 2656-3649

Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera Tahun 2021					
15.	Dwi Ratnasari dan Dianita Meirini 2022 Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, dan Silpa dalam Pengaruhnya Kinerja Keuangan	• Pendapatan Asli Daerah • Belanja Modal • Kinerja Keuangan	• Dana Perimbangan • Silpa	Kinerja Keuangan tidak dapat dipengaruhi oleh Pendapatan Asli Daerah, 2022 Kinerja Keuangan secara negatif signifikan oleh Dana Perimbangan dan Silpa, serta Kinerja Keuangan dapat dipengaruhi oleh Belanja Modal	Jurnal Akuntansi Vol. 17 No. 1 Mei 2022 Universitas Siliwangi ISSN: 1907-9958 e-ISSN: 2685-9246
16.	Afia Maulina, Mustafa Alkamal, Nabila Salsa Fahira 2021 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, dan Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	• Pendapatan Asli Daerah • Belanja Modal • Ukuran Pemerintah Daerah	• Dana Perimbangan	Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah, sedangkan Belanja Modal dan Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.	Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research Vol. 5 No. 2 Mei 2021 STIMIK Jayakarta e-ISSN: 2598-8719 p-ISSN: 2598-8700
17.	Amanda Yecci Noeng, Yuliana Anggreini Dua Delang Kolut, Elisabhet Yessi Da Rato 2023 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kinerja Keuangan Daerah (Studi Kasus pada Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2016-2020)	• Pendapatan Asli Daerah • Kinerja Keuangan Daerah	• Dana Perimbangan • Pertumbuhan Ekonomi	Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Daerah, Dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Daerah, dan Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Daerah	Jurnal Accounting UNIPA Vol. 2 Desember 2023 Universitas Nusa Nipa p-ISSN: 2407-1110 e-ISSN: 2986-7118
18.	Indah Puspa Sari 2016 Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Leverage, Dana Perimbangan, dan Ukuran Legislatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	• Ukuran Pemerintah Daerah • Pendapatan Asli Daerah • Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	• Leverage • Dana Perimbangan • Ukuran Legislatif	Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah, Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, Leverage tidak berpengaruh signifikan	Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Vol. 3 No. 1 Februari 2016 Universitas Riau ISSN:2355-6854

(Studi pada Kab/Kota Sumatera)		terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, Ukuran Legislatif tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.	
19. Afifah Fauziah dan Amalia N dan Haryanto 2019	Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2017	• Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, • Belanja Modal • Dana Alokasi Umum • Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, Belanja Modal tidak berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.
20. Lis Djuniar dan Ida Zuraida 2018	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan	• Pendapatan Asli Daerah • Belanja Modal • Kinerja Pemerintah Daerah • Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah, Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh negatif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah, serta Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh secara simultan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.
Nur Putriana Khadijah Sirait (183403141) Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah, dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Periode 2016-2023 (X1 Ukuran Pemerintah Daerah) (X2 Pendapatan Asli Daerah) (X3 Belanja Modal) (Y Kinerja Keuangan Daerah)			

2.2 Kerangka Pemikiran

Dengan adanya desentralisasi yang diatur dengan Undang-undang No.22 Tahun 1999 yang direvisi menjadi Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 yang memberi wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, termasuk salah satunya dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Sebagai penyelenggara daerah, pemerintah daerah mempunyai kewajiban dalam mengelola dana secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel untuk mendukung pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah daerah. Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, dibutuhkan adanya evaluasi agar dapat mengukur kinerja pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Dalam penelitian ini, untuk mengukur sejauh mana kemampuan pemerintah dalam mengelola keuangannya untuk membiayai kegiatan operasional, pembangunan, dan pemenuhan layanan masyarakat dilakukan pengukuran dengan menggunakan rasio keuangan yaitu rasio kemandirian. Dalam penelitian ini, kemandirian keuangan daerah dilihat dari sejauh mana pemerintah daerah mampu membiayai kebutuhan sendiri tanpa bergantung pada bantuan dari pemerintah pusat. Rasio kemandirian digunakan untuk mengukur seberapa besar pendapatan asli daerah (PAD) yang dapat dihasilkan dibandingkan dengan total pendapatan transfer dan pinjaman. Rasio ini penting karena menunjukkan apakah pemerintah daerah sudah memanfaatkan potensi daerahnya untuk kepentingan masyarakat publik. Semakin besar kontribusi pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan transfer dan pinjaman, maka daerah dianggap semakin mandiri secara keuangan. Sebaliknya,

jika pendapatan asli daerah hanya sedikit dan daerah lebih banyak mengandalkan dana transfer pusat, berarti tingkat kemandirian daerah masih rendah.

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah yaitu ukuran pemerintah daerah, pendapatan asli daerah, dan belanja modal berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Mustanda (2019) menghasilkan ukuran pemerintah daerah berpengaruh negatif kinerja keuangan pemerintah daerah, pendapatan asli daerah dan belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, selanjutnya terdapat penelitian yang dilakukan Mulyani dan Wibowo (2017) menunjukkan hasil bahwa belanja modal berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan daerah, *intergovernmental revenue* dan pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dari beberapa faktor yang sudah disebutkan diatas, penulis mengambil 3 (tiga) faktor yang memengaruhi kinerja keuangan daerah, yakni ukuran pemerintah daerah, pendapatan asli daerah, dan belanja modal.

Ukuran pemerintah daerah menggambarkan seberapa besar suatu daerah yang diukur dengan menggunakan total aset yang dikuasai oleh pemerintah. Besarnya total aset yang dimiliki pemerintah daerah memiliki peranan yang sangat penting karena dapat mendukung dalam kelancaran berbagai kegiatan operasional pemerintahan, sekaligus dapat menjadi saran yang mempermudah menyediakan layanan yang memadai sesuai kebutuhan masyarakat. Dengan sumber daya yang memadai atau aset yang besar diharapkan memberikan kontribusi terhadap peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah. Ukuran daerah dapat berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah, pernyataan ini didukung hasil

penelitian yang dilakukan oleh Natoen et al. (2019) menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, serta penelitian sebelumnya yang dilakukan Mulyani & Wibowo (2017), Nugroho & Prasetyo (2018), serta Sari dan Mustanda (2019) menunjukkan hasil penelitian bahwa ukuran pemerintah daerah namun berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sedangkan penelitian yang dilakukan Saraswati dan Sari (2019) menunjukkan hasil bahwa ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Selain ukuran pemerintah daerah, pendapatan asli daerah adalah salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Pendapatan asli daerah adalah seluruh penerimaan daerah yang bersumber dari potensi ekonomi lokal yang digunakan untuk mendanai pembangunan dan pemenuhan layanan publik. Optimalisasi penggalan potensi daerah, menjadikan perolehan pendapatan asli daerah yang tinggi sehingga dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Semakin besar kontribusi pendapatan asli daerah, maka semakin besar pula kemampuan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, yang pada akhirnya berimplikasi pada meningkatnya layanan publik. Jika kualitas pelayanan publik baik maka mencerminkan kinerja pemerintahan yang semakin baik (Kusuma 2017). Jika semakin besar kontribusi pendapatan asli daerah terhadap APBD, maka kinerja pemerintah dianggap semakin baik (Saraswati dan Rioni 2019). Hal ini sejalan dengan pernyataan dari penelitian dari Sari dan Mustanda (2019) Sari dan Halmawati (2021), Sari dan Mustanda (2019), Prastiwi dan Aji (2020) yang menyatakan bahwa semakin tinggi pendapatan asli daerah maka semakin tinggi

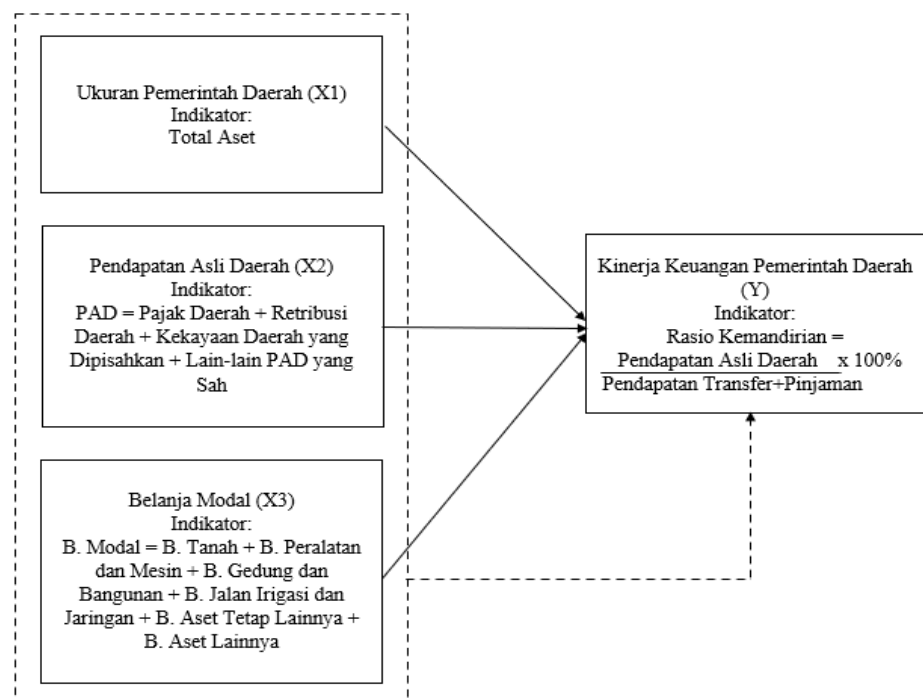
juga kemampuan daerah dalam memenuhi kebutuhan dan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakatnya apabila daerah mampu mengelola dengan baik.

Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan pemerintah daerah yang berkaitan dengan perolehan aset tetap yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun anggaran. Belanja modal merupakan investasi jangka panjang dalam bentuk infrastruktur dan aset tetap. Adanya belanja modal diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, sehingga dapat meningkatkan kinerja keuangan daerah (Atmoko dan Khairudin 2022). Belanja modal memiliki peran strategis dalam mendorong potensi ekonomi yang dimiliki daerah. Investasi pada aset-aset yang produktif dapat membuka peluang sumber-sumber pendapatan yang baru. Adanya infrastruktur yang memadai dapat membantu memperlancar aktivitas ekonomi masyarakat. Ketika kegiatan ekonomi berjalan lancar maka produktivitas masyarakat meningkat dan potensi investasi menjadi lebih besar. Peningkatan aktivitas ekonomi tersebut berpengaruh terhadap bertambahnya sumber-sumber penerimaan daerah baik dari pajak daerah retribusi maupun pendapatan lainnya. Dengan kata lain, infrastruktur yang memadai secara tidak langsung dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Semakin tinggi pendapatan asli daerah yang diterima pemerintah daerah, maka semakin kuat pula kemampuan keuangan daerah untuk membiayai belanja pembangunan dan pelayanan publik. Hal ini menunjukkan bahwa infrastruktur yang memadai dapat berdampak pada meningkatnya kinerja keuangan pemerintah daerah. Dengan optimalisasi belanja modal daerah dapat meningkatkan kemampuan daya saing dalam ekonomi yang pada gilirannya akan berkontribusi terhadap peningkatan kinerja keuangan

pemerintah daerah. adanya efisiensi dalam penggunaan anggaran dan perbaikan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan pernyataan dari penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Mustanda (2019), Novita dan Arta (2024) bahwa belanja modal memiliki dampak positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Dari uraian diatas, berdasarkan penelitian sebelumnya penulis mengambil judul “Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah, dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2023”

Adapun kerangka pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut:



Keterangan:

Secara Parsial = ———

Secara Bersama-sama = ———

Gambar 2. 1
Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Berdasarkan uraian kerangka berpikir di atas maka hipotesis yang dibangun dalam penelitian ini adalah:

1. Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah, dan Belanja Modal secara parsial berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.
2. Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah, dan Belanja Modal secara simultan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.